

## PUTUSAN MK TERHADAP GUGATAN PASLON 01 DAN 03 DALAM PILPRES 2024

Hasbi Hasidiqi<sup>1</sup>, M Rizky Ardiansyah<sup>2</sup>, M Rifki Ramadhan<sup>3</sup>, Pia Khoirotun Nisa<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu  
Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

\* [hhasidiqi252@gmail.com](mailto:hhasidiqi252@gmail.com)

### Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 menarik perhatian publik karena menolak gugatan dari paslon 01 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) dan paslon 03 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD). Dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo pada Senin, 22 April 2024, lima dari delapan hakim konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan tersebut, sementara tiga hakim menyampaikan dissenting opinion. Keputusan ini mengesahkan paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang resmi Pilpres 2024. Respons dari paslon yang kalah menunjukkan kekecewaan, tetapi mereka menyatakan kesiapan untuk menerima putusan dan melanjutkan langkah politik mereka. Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengindikasikan kesiapannya untuk mengikuti arahan dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi, keputusan MK diharapkan dapat diterima oleh semua pihak, menandai akhir dari proses sengketa pemilu dan membuka babak baru bagi pemerintahan yang akan datang di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilu 2024, Paslon, MK, Gugatan

### PENDAHULUAN

Pemilu 2024, dengan segala kompleksitas dan signifikansinya, tidak hanya merupakan puncak dari sebuah siklus politik, tetapi juga sebuah lakon besar dalam narasi demokrasi global. Proses pemilihan ini tidak terlepas dari latar belakang historis dan sosial-politik masing-masing negara, yang mencerminkan jalinan panjang antara aspirasi rakyat dengan mekanisme pemerintahan. Dalam skala yang lebih luas, Pemilu ini menjadi sebuah platform global di mana prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat diuji dan dipertaruhkan.

Dari perspektif manajemen publik, Pemilu 2024 memerlukan kerja keras, inovasi, dan dedikasi yang tak kenal lelah dari berbagai pihak (Fahrudin & Billah, 2023). Pemerintah,

lembaga pemilu, partai politik, LSM, media, dan tentu saja, rakyat, semuanya memainkan peran kritical dalam menyukseskan proses demokrasi ini. Setiap entitas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga sebuah festival demokrasi yang mendidik, transparan, dan inklusif.

Pemilu 2024 bukan hanya sekedar pemilihan pemimpin, melainkan juga refleksi dan afirmasi dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri (Hidayaturrahman et al., 2023). Proses ini harus menjadi momen di mana masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah, merenungkan arah masa depan negara, dan terlibat secara aktif dalam penentuan nasib kolektif. Dengan demikian, Pemilu 2024 memiliki potensi untuk menjadi tonggak sejarah baru dalam evolusi demokrasi, di mana setiap suara dihitung, setiap pendapat dihargai, dan setiap pilihan membawa dampak nyata bagi masa depan bangsa.

## METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan studi literatur, yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan, melibatkan serangkaian langkah untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis. Ini mencakup membaca, mencatat, dan mengolah materi penelitian dari berbagai dokumen, jurnal, cerita pendek, dan referensi pendukung lainnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan untuk mengungkapkan informasi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, dalam tahap historiografi, penulis berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin sumber, baik dalam bentuk dokumen maupun arsip.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tantangan, Isu, Dan Prospek Pemilu 2024

Pemilihan umum (pemilu) 2024 akan menjadi pemilu ketujuh di Indonesia sejak era reformasi. Pemilu ini akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah. Pemilu ini juga akan menjadi pemilu pertama yang menggunakan sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah di semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Pemilu 2024 akan menjadi ajang yang menarik dan penuh tantangan bagi partai politik serta calon-calon yang bersaing. Dengan partisipasi yang semakin meningkat dari berbagai segmen masyarakat, kompetisi politik di tingkat nasional maupun lokal menjadi semakin sengit. Calon presiden dan wakil presiden akan bersaing untuk meraih dukungan rakyat dengan menyampaikan visi, program, dan komitmen mereka dalam memimpin negara ke depan. Di samping itu, calon legislatif di tingkat pusat dan daerah juga akan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan pemerintah.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilu 2024 diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan adanya sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah, diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin yang memiliki keterhubungan langsung dengan masyarakat serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pemilu kali ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat fondasi demokrasi dan meneguhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Pemilu 2024 di Indonesia diharapkan menjadi pesta demokrasi yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Namun, seperti halnya pemilu di banyak negara lain, pemilu ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, yang telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi secara signifikan. Pandemi ini mempengaruhi berbagai aspek pemilu, termasuk kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan hasil.

Meskipun demikian, ada juga dampak positif yang muncul dari adaptasi terhadap situasi pandemi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin ditingkatkan untuk memfasilitasi kampanye dan partisipasi pemilih. Berbagai platform daring digunakan untuk menyampaikan informasi tentang visi, program, dan rencana kerja calon pemimpin kepada pemilih, memungkinkan akses yang lebih mudah dan luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Selain itu, pemilihan umum daring juga membuka peluang bagi partisipasi pemilih yang berada di luar negeri atau berada di daerah terpencil, yang sebelumnya mungkin sulit untuk mengakses tempat pemungutan suara. Dengan demikian, meskipun pandemi Covid-19 menghadirkan berbagai tantangan, tetapi juga mendorong inovasi dan transformasi dalam pelaksanaan pemilu, menjadikannya lebih inklusif dan menguntungkan bagi partisipasi demokratis.

Selain pandemi dan polarisasi politik, faktor lain yang turut memengaruhi dinamika pemilu adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan perubahan sosial yang terjadi. Ketidakstabilan ekonomi sering kali menjadi perhatian utama dalam konteks pemilihan umum, karena kebijakan ekonomi yang diusulkan oleh kandidat dapat memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Persoalan seperti pengangguran, inflasi, dan kesenjangan ekonomi menjadi fokus yang tak kalah pentingnya bagi para pemilih saat mereka memilih calon yang dianggap mampu mengatasi tantangan tersebut.

Perubahan sosial juga tidak bisa diabaikan dalam proses pemilihan umum. Dengan munculnya isu-isu seperti hak-hak LGBT, keberlanjutan lingkungan, dan perubahan budaya, pemilih cenderung mencari pemimpin yang dapat mengakomodasi nilai-nilai dan kebutuhan baru yang muncul dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan bagi kandidat dan partai politik untuk beradaptasi dan mengubah narasi mereka sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang.

Secara keseluruhan, pemilihan umum tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh sejumlah variabel yang saling terkait. Penting bagi pemilih untuk memahami berbagai isu yang dihadapi oleh negara dan masyarakat serta cara calon-calon menghadapinya. Sementara bagi para calon, mereka perlu memperhatikan beragam kepentingan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat merumuskan visi dan program yang inklusif dan relevan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai isu ini, diharapkan proses pemilihan umum dapat berjalan dengan lebih demokratis, inklusif, dan memberikan hasil yang sesuai dengan kehendak masyarakat.

Pemilu 2024 akan menjadi ajang kompetisi yang sengit antara berbagai calon, partai, dan koalisi politik yang masing-masing memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Persaingan ini akan menciptakan dinamika politik yang menarik dan membangkitkan antusiasme di kalangan pemilih. Namun, di sisi lain, persaingan ini juga menuntut adanya transparansi, integritas, dan keadilan dalam seluruh proses pemilu.

Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Informasi yang jelas dan terbuka mengenai proses pemilihan, pengeluaran kampanye, dan pemenuhan aturan-aturan pemilu menjadi penting agar pemilih dapat membuat keputusan yang informasional dan terinformasi.

Integritas juga harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Para calon, partai politik, dan lembaga terkait harus berkomitmen untuk menghindari segala bentuk kecurangan, penipuan, atau praktik-praktik yang tidak etis. Kehadiran pengawasan yang ketat dari lembaga independen juga penting untuk mencegah dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Selain itu, keadilan harus menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Setiap pemilih harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memberikan suaranya, tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang tidak adil. Pengaturan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak pemilih menjadi kunci untuk menjaga integritas proses pemilu.

Dengan memastikan transparansi, integritas, dan keadilan dalam seluruh proses pemilu, diharapkan bahwa hasil pemilihan yang dihasilkan akan mencerminkan kehendak sebenarnya dari masyarakat. Pemilu yang adil dan terpercaya adalah landasan dari sistem demokrasi yang kuat dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, semua pihak harus berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut demi mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis.

Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam pemilu 2024 adalah siapa yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat minimal untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah mendapat dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Dengan demikian, hanya ada beberapa partai atau koalisi yang memenuhi syarat tersebut, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai NasDem.

Beberapa nama yang telah muncul sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden antara lain adalah Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah dari PDIP), Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan dari Gerindra), Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta dari Gerindra), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Gerindra), Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat dari PKB), Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dari Golkar), dan Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem). Selain itu, ada juga nama-nama lain yang dianggap berpotensi, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara), dan Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).

Pemilu 2024 juga akan menjadi pemilu yang menarik karena akan menggunakan sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah di semua provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem ini dianggap lebih demokratis dan mengurangi praktik politik uang dan oligarki. Namun, sistem ini juga menimbulkan tantangan, seperti biaya politik yang tinggi, kompleksitas teknis, dan potensi konflik sosial. Pemilu 2024 akan menjadi ujian bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih untuk menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia.

Pemilu 2024 adalah pemilu yang penting bagi masa depan Indonesia. Pemilu ini akan menentukan arah kebijakan dan pembangunan negara untuk lima tahun ke depan. Pemilu ini juga akan menjadi cerminan dari kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pemilu ini harus dilaksanakan dengan baik, jujur, adil, dan akuntabel. Pemilu ini juga harus diikuti dengan semangat persatuan, toleransi, dan kebhinekaan. Pemilu ini adalah hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia.

#### Hasil Keputusan Pemilu 2024

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia telah menjadi fokus perhatian yang meluas, mencakup tidak hanya peranannya sebagai panggung bagi demokrasi yang dinamis, tetapi juga sebagai cerminan yang jelas dari kompleksitas sosial dan ekonomi yang ada dalam negara ini. Dalam konteks ini, penting untuk mengakui bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, terutama Mahkamah Konstitusi (MK), berperan sangat vital dalam memastikan kelancaran serta integritas dari proses pemilu itu sendiri, serta dalam menyelesaikan potensi sengketa yang mungkin timbul akibat hasil pemilu.

Sebagai pelindung konstitusi, peran MK tidak dapat diabaikan. Harapannya, MK dapat melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap keputusannya. Dengan melakukan hal ini, MK dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kesucian dan kejujuran dari proses pemilu, yang pada gilirannya memperkuat pondasi demokrasi di negara ini.

Dalam konteks yang lebih luas, pemilihan umum tidak hanya menjadi sebuah acara politik, tetapi juga sebuah panggung dimana nilai-nilai demokrasi dan tata pemerintahan yang baik diuji. Dengan demikian, keberhasilan dan integritas MK dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu dapat memberikan sinyal yang kuat tentang kekuatan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dalam esensi yang lebih mendalam, MK bukan hanya sekadar institusi hukum; ia adalah penjaga inti dari kesatuan dan integritas konstitusi, yang merupakan landasan moral dan hukum dari negara. Oleh karena itu, keberhasilan MK dalam menjalankan tugasnya secara adil dan transparan tidak hanya memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu saat ini, tetapi juga membentuk arah dan karakter demokrasi Indonesia di masa depan. Dengan demikian, dalam menanggapi dan menghadapi Pemilu 2024, penting bagi semua pihak untuk mengakui peran sentral MK dalam memelihara kepercayaan publik dan kestabilan politik. Hanya dengan menghormati dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis seperti MK, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap pemilihan umum adalah cerminan yang jelas dari kedewasaan politik dan kematangan institusi dalam menjalankan demokrasi yang sesungguhnya.

Dari perspektif ekonomi, pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 telah menimbulkan dampak yang sangat berarti. Tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu tidak hanya mencerminkan kedewasaan politik yang tinggi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, terdapat fenomena menarik yang terjadi seiring dengan periode pemilu, yaitu perlambatan dalam pertumbuhan simpanan nasabah. Fenomena ini termanifestasikan dalam penurunan pertumbuhan deposito dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Penurunan ini menandakan bahwa masyarakat mungkin mengalami kecenderungan untuk lebih berhati-hati

dalam mengelola keuangan mereka selama periode pemilu. Ini dapat diinterpretasikan sebagai respons alami terhadap ketidakpastian politik yang seringkali menyertai proses pemilihan umum. Penting untuk dicatat bahwa perlambatan simpanan nasabah ini bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Sebaliknya, hal ini dapat dianggap sebagai refleksi dari perubahan perilaku konsumen yang terjadi di tengah-tengah gejolak politik (Sadzali, 2022). Selama masa pemilu, masyarakat mungkin cenderung untuk menahan diri dari pengeluaran yang besar dan lebih memilih untuk menyimpan dana mereka sebagai bentuk persiapan menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi yang mungkin terjadi setelah pemilu selesai. Faktor psikologis juga mungkin memainkan peran dalam fenomena ini, di mana masyarakat merasa perlu untuk meningkatkan ketahanan keuangan mereka sebagai respons terhadap ketidakpastian yang mungkin timbul akibat perubahan politik yang mungkin terjadi setelah pemilihan umum. Dengan demikian, perlambatan dalam pertumbuhan simpanan nasabah selama bulan pemilu bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan secara eksternal, tetapi lebih merupakan respons alami dari masyarakat terhadap perubahan lingkungan politik. Meskipun demikian, fenomena ini tetap menjadi catatan penting bagi pemerintah dan pelaku ekonomi untuk dipertimbangkan dalam merencanakan kebijakan ekonomi dan menanggapi dinamika sosial selama periode pemilihan umum.

Hasil pemilihan umum itu sendiri menimbulkan sejumlah kejutan yang menarik. Quick count Pilpres 2024 menunjukkan kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan margin suara yang signifikan. Kemenangan ini tidak hanya mencerminkan preferensi politik masyarakat yang tergambar melalui suara yang diberikan, tetapi juga memberikan sinyal kuat akan potensi perubahan arah kebijakan pemerintahan yang akan datang. Kemenangan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran dalam lanskap politik Indonesia, dengan pemilih mengungkapkan aspirasi mereka melalui dukungan terhadap pasangan tersebut.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia telah menjadi sorotan internasional setelah pengumuman hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 20 Maret 2024. Proses rekapitulasi suara yang melibatkan berbagai tingkatan, dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional, akhirnya menetapkan pemenang dalam dua kategori utama: pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Hasil ini membawa implikasi yang mendalam terhadap arah politik dan sosial Indonesia.

Dalam konteks pemilihan presiden, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengukir prestasi gemilang dengan berhasil meraih mayoritas suara yang luar biasa, mencapai angka sebesar 96.214.691 suara, sebuah pencapaian yang menjadikan mereka sebagai pemenang tak terbantahkan. Keunggulan mereka terpancar jelas melalui dominasi yang mereka tunjukkan di 36 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, menegaskan kedigdayaan mereka secara nasional. Di sisi lain, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, hanya mampu memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengantongi 27.040.878 suara. Perbedaan suara yang mencolok antara pemenang dan pesaingnya memberikan gambaran yang kuat tentang perubahan yang terjadi dalam peta politik Indonesia, menyoroti dinamika yang berkembang di tingkat nasional. (Aji & Indrawan, 2020)

Sementara itu, hasil pemilihan legislatif juga menandai pergeseran yang signifikan dalam lanskap partai politik. PDI Perjuangan muncul sebagai pemenang mutlak dengan mengumpulkan 25.387.279 suara dari total 84 daerah pemilihan, menegaskan posisinya sebagai kekuatan politik utama di Indonesia. Partai Golkar dan Gerindra masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga dengan perolehan suara yang cukup tinggi, menandakan ketegangan dan persaingan yang terjadi di antara kekuatan politik yang mapan dan kehadiran baru dalam arena politik. Hasil ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Indonesia, di mana kekuatan tradisional terus bersaing dengan munculnya pemain baru yang berpotensi mengubah peta politik secara signifikan.

Kemenangan yang jelas bagi pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden memiliki implikasi yang sangat beragam bagi lanskap politik Indonesia. Pertama-tama, hasil ini menandai adanya pergeseran yang signifikan dalam dinamika politik nasional, dengan munculnya kekuatan baru yang memiliki pengaruh yang kuat. Dengan demikian, hal ini dapat menghasilkan perubahan kebijakan dan prioritas pemerintah yang berpotensi berdampak luas pada berbagai sektor masyarakat.

Dalam konteks ekonomi, kemenangan ini bisa mengarah pada implementasi kebijakan-kebijakan baru yang bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga mungkin menjadi fokus utama dalam agenda pemerintahan baru. Di samping itu, dalam aspek sosial, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran mungkin membawa dampak pada kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintahan yang baru dapat berupaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan publik dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, dalam konteks lingkungan, kemenangan ini bisa memunculkan upaya-upaya baru dalam perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan lingkungan yang lebih progresif dan berkelanjutan mungkin diperkenalkan untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan. Secara keseluruhan, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran memiliki implikasi yang luas dan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan kebijakan dan prioritas pemerintah yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kemenangan ini dapat membentuk arah baru bagi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang, serta mempengaruhi kesejahteraan dan masa depan negara secara keseluruhan.

Kedua, hasil pileg yang menampilkan dominasi partai-partai tertentu menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuatan di dalam lembaga legislatif. Dengan kekuatan mayoritas, partai pemenang dapat memperjuangkan agenda-agenda politik mereka dengan lebih mudah, sementara partai oposisi perlu menemukan cara untuk mempengaruhi proses keputusan.

Terakhir, partisipasi yang tinggi dalam pemilu ini menunjukkan tingkat kesadaran politik yang meningkat di kalangan masyarakat Indonesia. Ini mencerminkan semangat demokrasi yang kuat dan keinginan untuk berkontribusi dalam pembentukan masa depan negara.

Dengan demikian, hasil lengkap pemilu 2024 Indonesia tidak hanya mencerminkan perubahan politik yang signifikan, tetapi juga memberikan landasan bagi transformasi sosial

dan ekonomi yang lebih luas di masa mendatang. Perjalanan politik Indonesia selanjutnya akan dipengaruhi oleh cara pemenang memanfaatkan mandat yang diberikan oleh rakyat, serta bagaimana partai politik dan masyarakat secara keseluruhan menanggapi dinamika politik yang baru saja terwujud.

Pemilu 2024 juga menyoroti peran yang semakin penting dari pemilih muda serta isu politik dinasti. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan figur-figur muda seperti Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam pemilihan presiden menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam politik Indonesia, di mana generasi muda mulai mendapatkan tempat yang lebih besar dalam kancah politik nasional. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan inklusi yang lebih besar dari kalangan pemuda dalam proses politik, tetapi juga mengakui hak-hak politik mereka dalam mengambil peran aktif dalam pembentukan masa depan negara. Penting untuk mencatat bahwa peningkatan partisipasi politik dari pemilih muda telah menjadi tren global yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Generasi muda sering kali membawa gagasan-gagasan segar dan pandangan baru yang dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan yang kompleks dalam tatanan politik dan sosial. Dalam konteks Indonesia, peran pemilih muda semakin penting dalam membentuk arah politik negara, dan keputusan MK untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersaing dalam arena politik tingkat tinggi merupakan langkah yang signifikan dalam mengakui kontribusi potensial mereka. Namun, kehadiran politik dinasti tetap menjadi isu yang menarik dalam konteks ini. Meskipun putusan MK membuka pintu bagi figur-figur muda untuk terlibat dalam politik, ada kekhawatiran bahwa dominasi politik oleh keluarga-keluarga politik yang berpengaruh dapat mengarah pada polarisasi politik yang lebih besar. Pengaruh politik dinasti sering kali dikaitkan dengan kekuatan ekonomi dan sumber daya yang besar, yang dapat mengendalikan proses politik dan menghambat inklusi politik yang lebih luas. Oleh karena itu, sementara inklusi pemuda dalam politik merupakan perkembangan yang positif, penting untuk mengawasi pengaruh politik dinasti dan memastikan bahwa proses politik tetap terbuka dan adil bagi semua pemangku kepentingan. Perlindungan terhadap prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan keadilan dalam proses politik harus tetap menjadi prioritas, sehingga partisipasi pemilih muda dapat membawa perubahan yang positif tanpa terperangkap dalam dinamika politik yang tidak sehat. Dengan demikian, pemilu 2024 telah memunculkan pertanyaan yang penting tentang peran pemilih muda dan tantangan yang dihadapi oleh politik dinasti, yang memerlukan perhatian dan tindakan yang tepat dari semua pemangku kepentingan politik dan masyarakat secara luas. (Yandra et al., 2023)

### Sengketa Pemilu Presiden

Pemilihan presiden (pilpres) merupakan puncak dari proses demokrasi di sebuah negara. Pilpres 2024 telah menuai kontroversi sejak awal, menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Aspek Hukum Administrasi Negara (HAN) memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa ini, mengingat HAN berfungsi sebagai pengatur hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks administratif. (Afiyah & Hadi, 2024)

Pilpres 2024 telah diwarnai oleh berbagai permasalahan yang mengakibatkan sengketa hukum. Mulai dari proses pencalonan, kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan suara,



setiap tahapan memiliki potensi untuk menimbulkan konflik hukum yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme HAN.

Dalam konteks Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai arena penyelesaian akhir dari sengketa pemilu, aspek Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran sentral yang tak terbantahkan dalam memastikan kesesuaian setiap tahap proses administratif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MK, sebagai lembaga peradilan konstitusi tertinggi di negara, bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap setiap prosedur pemilu, mengawasi dari tahap pencalonan calon pemilihan, melalui proses pemungutan suara yang dilakukan oleh warga negara, hingga tahap penghitungan suara yang akurat dan transparan, serta penetapan hasil pemilu yang sah. (Purwatiningsih & Polri, n.d.)

Dalam upaya untuk menjamin keadilan dan integritas pemilu, Mahkamah Konstitusi memeriksa setiap tahapan pemilu dengan teliti, memastikan bahwa setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh lembaga terkait, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun instansi-administratif lainnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa proses pencalonan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang pemilu, serta prosedur pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara transparan dan adil, tanpa adanya intervensi atau kecurangan.

Selain itu, MK juga memiliki tanggung jawab untuk menangani sengketa atau pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu. Ini mencakup penerimaan pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses pemilu, serta melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung klaim-klaim tersebut. (Barus, 2021)

Pentingnya HAN dalam konteks sengketa pemilu tidak terbatas hanya pada Sidang MK, tetapi juga meliputi setiap aspek administratif pemilu. Misalnya, dalam kasus gugatan terhadap hasil pemilu (Hayati, 2022a), HAN memberikan kerangka hukum untuk menilai apakah ada pelanggaran prosedur yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Ini mencakup evaluasi terhadap tindakan penyelenggara pemilu, penggunaan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu secara keseluruhan.

Sengketa yang muncul seputar Pilpres 2024, di mana tuduhan tentang manipulasi suara dan pelanggaran prosedur pemilu menjadi perdebatan hangat, peran Hukum Administrasi Negara (HAN) memperoleh sorotan yang lebih tajam. Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan sebagai forum penyelesaian sengketa semacam ini haruslah menggantungkan pertimbangannya pada prinsip-prinsip HAN untuk menilai keabsahan klaim-klaim yang diajukan.

HAN menjadi instrumen vital dalam mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan dalam sidang MK, memastikan bahwa setiap tuduhan mengenai pelanggaran prosedur pemilu dievaluasi dengan cermat dan adil. Prinsip-prinsip HAN, seperti kepastian hukum, proporsionalitas, dan keterbukaan administratif, menjadi pedoman bagi MK dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada hukum yang berlaku (Ramdani, 2022). Ini berarti bahwa tidak hanya substansi dari undang-undang yang harus diperhatikan, tetapi juga bagaimana proses administratif secara praktis dijalankan dan diawasi.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip HAN, Sidang MK harus memastikan bahwa setiap putusan yang diambil mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan administratif secara tegas dan adil. Ini berarti bahwa keputusan MK tidak hanya didasarkan pada aspek-aspek formal dari undang-undang, tetapi juga pada aspek-aspek administratif yang mendasari integritas dan transparansi dari proses demokratis itu sendiri.

Lebih dari sekadar alat untuk menafsirkan undang-undang, HAN di sini menjadi landasan kunci untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam proses demokratis (Hayati, 2022b). Dengan memastikan bahwa setiap tuduhan pelanggaran pemilu dievaluasi dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAN, MK memainkan peran penting dalam mempertahankan keabsahan dan legitimasi dari proses demokratis, serta membangun fondasi yang kuat bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis.

#### Putusan MK Terhadap Gugatan Paslon 01 dan 03 dalam Pilpres 2024

Dalam sebuah putusan yang sangat ditunggu-tunggu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, pada Senin, 22 April 2024, menjadi momen krusial dalam menentukan arah politik Indonesia pasca-pemilihan presiden. Lima dari delapan hakim konstitusi, termasuk Suhartoyo, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, bersepakat untuk menolak gugatan tersebut.

Namun, keputusan ini tidak diambil dengan suara bulat. Tiga hakim konstitusi, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda terhadap putusan tersebut.

Dengan penolakan gugatan oleh MK, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka secara resmi menjadi pemenang dalam Pilpres 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan akan menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu, 24 April 2024.

Reaksi dari kedua paslon yang kalah dalam gugatan ini bervariasi. Paslon 01 dan 03, meskipun kecewa, tampaknya siap untuk menerima keputusan MK dan melanjutkan langkah politik mereka. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa ia akan menunggu arahan selanjutnya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Keputusan MK ini menandai akhir dari proses panjang sengketa hasil pemilihan umum, dan membuka babak baru bagi pemerintahan yang akan datang. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi, keputusan ini diharapkan dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi dasar bagi stabilitas politik dan kemajuan Indonesia.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan dari paslon 01 dan 03 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, secara resmi diumumkan sebagai pemenang. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi, keputusan MK diharapkan dapat diterima oleh

semua pihak, menandai akhir sengketa pemilu dan membuka babak baru bagi pemerintahan yang akan datang di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almuntasor, M. E. S., Abdurahman, A., Faqih, M. I., SM, A. S. H., & Wahyudi, A. (2022, December). Optimalisasi peran pemilih pemula pada pemilu 2024 dan tantangan demokrasi indonesia ke depan. In *Prosiding Seminar Nasional Hi-Tech (Humanity, Health, Technology)* (Vol. 1, No. 1).
- Barokah, F., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01), 1-13.
- Elizamiharti, E., & Nelfira, N. (2024). Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 61-72.
- Junaidi, A. (2022). Peluang dan Tantangan Pesta Demokrasi 2024 dan Jaminan Perlindungan Sosial Ekonomi Lingkungan Hidup. *ANNAQOID: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 23-30.
- Muldani, T., Swarnawati, A., Muksin, N. N., & Harmonis, H. (2023). Publisitas Politik Aceng Aziz Muslim Menuju Pemilihan Umum 2024 di Facebook. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 7(2), 47-56.
- Noak, P. A. (2023). Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12, 596-612.
- Widyana, M. R. (2022). Strategi Partai Gelora Sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 Untuk Memenuhi Parliamentary Threshold. *Jurnal PolGov*, 4(1), 125-168.
- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2020). Hambatan dan tantangan partai politik: Persiapan menuju pemilihan umum 2024. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(2), 214-229.
- Aliano, Y. A., & Adon, M. J. (2023). Percaturan Politik Geneologi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu '2024' Di Indonesia Perspektif Etika Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 474-486.
- Almuntasor, M. E. S., Abdurahman, A., Faqih, M. I., SM, A. S. H., & Wahyudi, A. (2022). Optimalisasi peran pemilih pemula pada pemilu 2024 dan tantangan demokrasi indonesia ke depan. *Prosiding Seminar Nasional Hi-Tech (Humanity, Health, Technology)*, 1(1).
- Alvin, S. (2022). Analisis Framing Isu Penundaan Pemilu 2024 di CNN Indonesia. com dan Kompas. com. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 16(2), 133-148.
- Amir, M. (2020). keserentakan pemilu 2024 yang paling ideal berdasarkan putusan mahkamah Konstitusi Republik indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115-131.
- Barokah, F., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01), 1-13.
- Hardiyanti, M., Pratama, P. A., Saputra, A. D., & Sholehah, M. M. (2022). Urgensi Sistem E-Voting dan SIREKAP dalam Penyelenggaraan PEMILU 2024. *Journal Equitable*, 7(2), 249-271.
- Katili, Y., & Latuda, F. (2022). Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 172-182.
- Maulana, G. I., Fridawati, P. I., & Masruroh, H. (2022). Pemilu 2024: Pesta demokrasi akbar pembangkit kondisi ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(8), 751-757.

- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 193–218.
- Sujito, A. (2022). Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024. *Jurnal Pancasila*, 3(2), 13–32.
- Yandra, A., Sudaryanto, S., Sintiya, B., Arizal, A., & Rianita, D. (2023). Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih oleh KPU Provinsi Riau Jelang Pemilu 2024. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 6(2), 164–179.
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi generasi millennial dalam mengawasi tahapan pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646–9653